



# SAMBUTAN MENTERI PANRB

November  
Desember 2019



## KATA PENGANTAR

Naskah sambutan, *keynote speech*, dan orasi ilmiah Menteri PANRB bukan sekedar lembaran-lembaran naskah yang bersifat administratif. Naskah-naskah tersebut merupakan wujud “kebijakan yang berbicara”, yang disampaikan secara langsung oleh Menteri PANRB selaku pimpinan organisasi.

Tidak hanya sebagai media penyampaian kebijakan, materi yang disampaikan oleh Menteri PANRB juga digunakan sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik dalam hal informasi capaian kinerja dan inovasi yang telah dilakukan Kementerian PANRB. Oleh karena itu, sebagai pejabat yang berwenang di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi, kehadiran Menteri PANRB dan materi yang disampaikannya menjadi hal yang ditunggu-tunggu dan menjadi perhatian banyak pihak.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, Sekretariat Kementerian PANRB menyusun buku yang berjudul “**SAMBUTAN MENTERI PANRB NOVEMBER-DESEMBER 2019**”, yang merupakan kompilasi naskah sambutan, *keynote speech*, dan orasi ilmiah Menteri PANRB periode bulan NOVEMBER hingga DESEMBER ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan oleh Menteri PANRB dapat diketahui oleh masyarakat secara luas, tidak hanya para peserta yang menghadiri acara pada saat Menteri PANRB menyampaikan materinya.

Kami terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga buku ini dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak.

Jakarta, Januari 2020

**Drs. Dwi Wahyu Atmaji, M.P.A.**

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>NOVEMBER 2019</b>	
1. Sambutan pada Acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Lingkungan Provinsi D.I.Yogyakarta, Yogyakarta, 4 November 2019....	1
2. Sambutan pada Acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Pemberian Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Jakarta, 5 November 2019.....	4
3. Arahan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, 6 November 2019.....	7
4. Sambutan Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah I Tahun 2019, Batam, 7 November 2019 .....	11
5. <i>Pointers</i> Kebijakan Strategis Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Bogor, 13 November 2019.....	15
6. Sambutan dalam Acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro Tahun 2019, Jakarta, 20 November 2019.....	20
7. <i>Pointers</i> Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II Tahun 2019, Jakarta, 22 November 2019 .....	23
8. Sambutan Menteri PANRB Pada <i>Ministerial Roundtable Meeting</i> Dalam Rangka ASEAN-KOREA <i>Commemorative Summit</i> , Busan, 26 November 2019.....	26
9. <i>Keynote Speech Minister</i> ASEAN-Republic of Korea <i>Commemorative Summit</i> , Busan, November 26 <sup>th</sup> 2019 .....	29
<b>DESEMBER 2019</b>	
10. Sambutan pada Acara Malam Anugerah ASN 2019, Jakarta, 2 Desember 2019 .....	32
11. <i>Pointers</i> pada Acara Pelepasan Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK. I Angkatan XLIII (43) Membangun <i>Agile Bureaucracy</i> untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa, Jakarta, 5 Desember 2019 .....	34
12. Sambutan pada Acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Jakarta, 10 Desember 2019.....	37



# **NOVEMBER**

# **2019**





**SAMBUTAN PADA ACARA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH PADA LINGKUNGAN PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 4 November 2019

**Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalammu'alaikum Wr. Wb.,  
Salam Sejahtera untuk Kita Semua.**

**Yang saya hormati:**

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bupati/Wali Kota di Lingkungan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Para Sekretaris Daerah, Kepala OPD, dan Seluruh Pejabat Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta; serta
- Para hadirin sekalian.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME yang atas perkenan-Nya lah kita dapat bertemu di hari ini, pada acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Wilayahnya.

**Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan,**

Visi untuk menciptakan Indonesia yang maju, bermartabat, berdaya saing, dan sejajar dengan negara-negara maju di dunia memerlukan kesiapan yang matang dari pemerintah. Salah satu hal yang perlu dipastikan adalah terwujudnya birokrasi yang kapabel dan berdaya saing, yang dapat menggerakkan roda pemerintahan serta menjalankan program-program pemerintah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Komitmen untuk menciptakan *profile* birokrasi seperti ini telah diutarakan oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan. Bahkan pada pidato pelantikan dan pidato kemenangannya beberapa waktu yang lalu, Presiden menyampaikan bahwa perbaikan birokrasi merupakan salah satu prioritas dan agenda utama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya menciptakan birokrasi yang berorientasi hasil, tidak semata berorientasi pada prosedur, proses, dan rutinitas yang monoton. Birokrasi harus menjamin bahwa program-programnya memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan bukan sekedar menjamin bahwa program itu terlaksana.

Dengan komitmen Presiden untuk memperbaiki pemerintahan yang sedemikian besar, rasanya tidak berlebihan jika saya memandang Kementerian PANRB sebagai kementerian strategis pada kabinet ini. Hal tersebut karena tanggung jawab untuk menciptakan perbaikan birokrasi sebagian besar berada pada tugas dan tanggung jawab Kementerian PANRB sebagai *leading sector* dan *prime mover* reformasi birokrasi.

Telah banyak program-program perbaikan birokrasi yang telah digulirkan oleh Kementerian PANRB yang secara nyata telah menghasilkan perubahan dan perbaikan bagi birokrasi, khususnya pada pemerintah daerah. Salah satu program utama yang berkontribusi besar adalah SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



**Para hadirin yang saya banggakan,**

SAKIP adalah sistem manajemen kinerja instansi pemerintah yang menekankan proses (1) perencanaan berbasis kinerja; (2) penganggaran berbasis kinerja; (3) penetapan perjanjian kinerja; (4) pengukuran kinerja; (5) evaluasi kinerja; dan (6) pelaporan kinerja sebagai pola manajemen pada instansi pemerintah. Titik tekannya adalah manajemen untuk menciptakan hasil/manfaat, bukan hanya manajemen untuk menyelesaikan program/kegiatan rutin semata. Melalui SAKIP, kami mendesak instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan manfaat/hasil atas setiap rupiah anggaran yang digunakan. Instansi pemerintah tidak boleh lagi hanya memikirkan realisasi kegiatan rutin dan serapan anggaran, tapi harus memikirkan apakah keberadaannya sudah memberikan hasil/kinerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat.



Suatu daerah yang telah memahami SAKIP dengan baik pasti telah memiliki sasaran dan ukuran keberhasilan berorientasi hasil pada dokumen perencanaan daerahnya. Selain itu, daerah tersebut akan memastikan setiap program dan kegiatan berdampak langsung dalam pencapaian sasaran pemerintah, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada masyarakat. Inilah sebenarnya yang disebut dengan prinsip

akuntabilitas berorientasi hasil melalui implementasi penganggaran berbasis kinerja sebagaimana yang menjadi amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dengan menerapkan proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, program, dan kegiatan yang tidak sesuai dan tidak berdampak kepada sasaran akan tereliminasi. Dampaknya, inefisiensi dan pemborosan semakin berkurang, dan birokrasi akan semakin efektif mendorong kemajuan pembangunan.

Dalam rangka terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran oleh seluruh instansi pemerintah, Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap tahunnya. Tujuan dari evaluasi ini adalah menilai (*assess*) dan membina (*assist*) instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas manajemen kerjanya, utamanya mendorong instansi pemerintah menerapkan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Kementerian PANRB tidak hanya menilai kemajuan instansi pemerintah, namun juga memberikan solusi dalam bentuk pembinaan dan bimbingan teknis kepada instansi pemerintah untuk semakin meningkatkan kualitas manajemen kerjanya.

**Hadirin sekalian yang saya hormati,**

Dalam hal penilaian akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pemerintah daerah terbaik di antara seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa sejak tahun 2014, Pemerintah Provinsi DIY telah mendapatkan kategori A dalam penilaian akuntabilitas kinerja. Bahkan pada tahun 2018, Provinsi DIY telah menjadi satu-satunya instansi pemerintah di Indonesia yang mendapatkan penilaian AA.

Penilaian yang sangat baik ini diberikan kepada Pemerintah Provinsi DIY karena telah menciptakan perbaikan proses perencanaan, penganggaran, dan manajemen kerjanya. Berdasarkan laporan dari



Bapak Gubernur, sejak tahun 2013-2017 telah terjadi efisiensi sebesar 1,6 triliun rupiah yang berasal dari penyederhanaan dan *refocussing* program/kegiatan yang pada awalnya berjumlah 3.150 kegiatan menjadi 854 kegiatan.

Selain itu, selama beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah Provinsi DIY telah menjalankan *reward dan punishment* bagi organisasi dan individu ASN yang berdasarkan pada kinerja. Pemerintah Provinsi DIY juga menjadi satu-satunya pemerintah daerah yang telah menetapkan struktur organisasi yang berdasarkan kinerja. Artinya, setiap struktur organisasi di dalam organisasi perangkat daerah telah disusun berdasarkan kebutuhan mencapai kinerja. Bukan hanya sebatas berdasar pada fungsi dan urusan saja.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DIY juga turut serta meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya, sehingga sampai dengan tahun 2018 kemarin terdapat 3 (tiga) pemerintah kabupaten yang mendapatkan predikat A yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo; serta 2 (dua) pemerintah kabupaten/kota mendapatkan predikat BB yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul. Mudah-mudahan kedua kabupaten/kota ini dapat segera menyusul tiga kabupaten lainnya menjadi A.

Pencapaian tersebut tentunya harus diapresiasi sebesar-besarnya. Karena perbaikan yang diciptakan oleh Pemerintah DIY tidak hanya ditujukan untuk daerahnya saja, tetapi juga bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Pemerintah Provinsi DIY telah menjadi *role model* bagi seluruh pemerintah daerah, bahkan bagi kementerian/lembaga. Hal ini terlihat dari banyaknya studi tiru yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga tersebut kepada Pemerintah Provinsi DIY.



Atas kondisi tersebut, Kementerian PANRB berterima kasih kepada Gubernur DIY beserta seluruh jajaran karena telah memberikan sumbangsih yang nyata dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Selain itu, pada kesempatan evaluasi akuntabilitas kinerja ini, saya juga berharap Pemerintah Provinsi DIY tetap mempertahankan capaian ini bahkan dapat meningkatkannya menjadi semakin sempurna. Kami akan terus menunggu inovasi dan gebrakan dari Pemerintah Provinsi DIY, tidak hanya pada SAKIP, tetapi juga pada aspek tata kelola pemerintahan lainnya.

Demikian, semoga upaya yang kita lakukan ini dapat secara konsisten kita pertahankan bahkan kita tingkatkan sehingga dapat menghasilkan manfaat yang nyata bagi pembangunan bangsa dan negara.

Terima Kasih.

*Bilahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Tjahjo Kumolo**



**SAMBUTAN PADA ACARA PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI  
DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK  
WILAYAH III TAHUN 2019**

Jakarta, 5 November 2019

*Assalamualaikum Wr., Wb.,*  
Shalom,  
Salam Sejahtera bagi Kita Semua,  
*Om Swastiastu,*  
*Namo Budhaya,*  
Salam Kebajikan

**Yang saya hormati:**

- Para Kepala Paguyuban:
  - a. Ketua KASN;
  - b. Kepala BKN;
  - c. Kepala LAN;
  - d. Plt. Kepala ANRI.
- Para Gubernur atau yang mewakili;
- Para Bupati dan Wali Kota atau yang mewakili;
- Para Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau yang mewakili;
- Para Narasumber:
  - a. Gubernur DIY, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X;
  - b. Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo.
- Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah;
- Insan Pers dan Media; serta
- Hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Pemberian Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Untuk Wilayah III Tahun 2019.

**Hadirin yang berbahagia,**

Pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat merupakan wujud nyata dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan publik bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Kita sama-sama mengetahui bahwa di era ini sering disebut dengan istilah “zaman *now*”, dimana masyarakat sangat bergantung pada *gadget* dan teknologi informasi. Menyikapi hal tersebut, maka pemerintah dituntut selalu mampu dan cepat beradaptasi dengan segala perubahan agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.



Tentu apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden merupakan sebuah tantangan besar yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Pelayanan publik tidak mampu berdiri sendiri tanpa disokong oleh keinginan yang kuat dari diri kita masing-masing untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik, agar apa yang menjadi harapan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat kita wujudkan. Semangat revolusi mental tidak boleh padam agar masyarakat tidak kehilangan harapan dan kepercayaan kepada pemerintah.

Selain itu, pimpinan juga memegang peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di unitnya masing-masing. Para pemimpin, khususnya kepala daerah, harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menuntun dan memberi motivasi bagi jajarannya agar bergerak cepat, kreatif, inovatif, dan profesional dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pemimpin diharapkan dapat menjiwai falsafah jawa yang berbunyi, *Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mbangun Karso, Tut Wuri Handayani*, yang berarti figur pemimpin yang baik adalah disamping menjadi suri tauladan atau panutan, juga harus mampu menggugah semangat dan memberikan dorongan moral dari belakang, agar orang – orang disekitarnya dapat merasa situasi yang baik dan bersahabat.

Jika kita bisa mengkolaborasikan antara keinginan yang kuat untuk berubah dengan komitmen pimpinan secara baik, maka apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, yaitu agar kita tidak berorientasi pada proses, tapi harus berorientasi hasil-hasil yang nyata, niscaya dapat kita laksanakan dengan baik, dan akan menciptakan terobosan-terobosan yang inovatif yang bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak.

**Bapak/Ibu hadirin yang saya hormati,**

Kegiatan evaluasi unit penyelenggara pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB ini, hanya menjadi alat untuk menggerakkan roda pemerintahan menuju pelayanan publik berkelas dunia. Kami berharap dengan kegiatan seperti ini dapat memacu semangat para kepala daerah, pimpinan perangkat daerah, dan para pihak terkait lainnya, untuk dapat berkompetisi dalam arti positif, guna sama-sama meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan kegiatan evaluasi semacam



ini, dapat diperoleh gambaran mengenai hal apa yang perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan lebih lanjut.

Saya berharap, bagi mereka yang sudah memperoleh nilai yang baik, sebaiknya tidak terlena dan berpuas diri, karena sifat pelayanan publik yang selalu dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat. Sedangkan bagi mereka yang belum memperoleh nilai yang memuaskan, agar terus berbenah serta belajar untuk terus memperbaiki diri agar bisa lebih baik lagi kedepannya.

Saran perbaikan yang telah disampaikan oleh tim evaluator juga saya harapkan dapat segera ditindaklanjuti dan diwujudkan, bukan semata-mata karena ingin memperoleh nilai, namun demi perbaikan diri sendiri dan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Spirit tersebut perlu terus ditumbuhkan, dijaga, dan ditularkan agar optimisme tersebut mampu merubah dan membentuk mental ASN yang melayani.

**Bapak/Ibu hadirin yang saya hormati,**

Saat ini tantangan bagi kita sebagai penyelenggara pelayanan publik tidak hanya soal rumitnya prosedur, korupsi, dan akuntabilitas, tetapi di seluruh dunia, tanpa disadari penyelenggara pelayanan publik juga mengalami tantangan: globalisasi, peningkatan populasi penduduk, kemampuan daya saing, pertumbuhan ekonomi bahkan secara khusus negara kita juga memiliki potensi bencana alam yang sering terlupakan. Kita harus mulai antisipatif dan responsif untuk menghadapi risiko tersebut.

Digitalisasi yang perlahan mulai mengubah pola dan budaya kerja, harus mampu mulai kita terapkan secara positif untuk menggalakkan pemerintahan berbasis *e-government* yang modern dan responsif. Meskipun saat ini pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari ideal namun bukan berarti kita pesimis dan pasif. Pelan namun pasti, tiap instansi pemerintah baik di level pemerintah pusat hingga daerah terus berbenah, mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan pelayanan prima. Beberapa capaian pelayanan publik pada tahun 2019, yang saya harap dapat dikembangkan kedepan, diantaranya: (1) Telah terbentuk 17 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia, dan hingga saat ini kami patut berbangga bahwa beberapa kepala daerah telah menyatakan komitmennya untuk membentuk MPP di wilayahnya masing-masing; (2) Gerakan *One Agency One Innovation* yang semakin membumi terbukti dari semakin meningkatnya minat instansi pemerintah dalam mengembangkan inovasi. Diawali pada tahun 2014 terjaring 515 proposal inovasi, tahun 2015 terjaring 1.189 proposal inovasi, tahun 2016 terjaring 2.476 proposal inovasi, tahun 2017 terjaring 3.054 proposal inovasi, tahun 2018 terjaring 2.824 proposal, dan tahun 2019 terjaring 3.156 proposal inovasi melalui *website* Sistem Informasi Pelayanan Publik. Kemudian proposal inovasi diseleksi dan diverifikasi, mengerucut pada *Top 99*, lalu dikerucutkan lagi pada *Top 45* inovasi pelayanan publik kategori terpuji (*outstanding*). Pada tahun 2018 dan 2019 inovasi pengendalian malaria melalui sistem EDAT Kabupaten Teluk Bintuni dan inovasi petabencana.id Badan Nasional Penanggulangan Bencana, berhasil meraih juara pada *United Nations Public Service Awards*.

Kami mengucapkan terima kasih atas komitmen dan kerja keras bapak/ibu hadirin semua, semoga apa yang telah kita kerjakan dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Dan kiranya Tuhan senantiasa menjadi penolong kita dalam mengemban tugas tersebut.

Terima Kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Tjahjo Kumolo**



**SAMBUTAN PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Jakarta, 6 November 2019

*Assalamualaikum Wr. Wb.,*  
Salam Sejahtera bagi Kita Semua.

**Yang saya hormati:**

- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP);
- Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
- Para Kepala Daerah;
- Pimpinan dan Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Seluruh K/L/D;
- Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) K/L/D;
- Perwakilan Ikatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa;
- Perwakilan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia;
- Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan LKPP; serta
- Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir di tempat ini dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan tema “Transformasi Pengadaan di Era Digital Untuk SDM Unggul Indonesia Maju”. Sejalan dengan tema tersebut saya akan menyampaikan mengenai arah kebijakan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Profesionalitas ASN.

**Hadirin yang saya hormati,**

Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden telah menyampaikan pentingnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka membuka partisipasi publik dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada publik, seperti kecepatan memberi izin dan merespon kebutuhan publik, melalui penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Presiden juga telah menegaskan bahwa Kementerian PANRB dalam periode 2019-2024 membangun *Core IT Systems of Government* sebagai upaya akselerasi Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya mengawal jalannya Reformasi Birokrasi, Kementerian PANRB mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. SPBE merupakan inisiatif program kerja pemerintah untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah, melalui transformasi pemerintahan dengan memanfaatkan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai penguatan pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, sehingga tujuan Reformasi Birokrasi dapat diwujudkan.





Dukungan TIK secara nyata telah memberikan kontribusi terhadap efektifitas dan efisiensi dalam suatu layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Keterpaduan TIK yang tentunya didukung dengan pengelolaan data pemerintah yang terpadu, dapat memperpendek rantai birokrasi sehingga memudahkan pengambilan keputusan bagi pemerintah, yang pada ujungnya dapat mendorong perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan optimalisasi pemanfaatan TIK, sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan transformasi digital, kita dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, baik pelayanan internal maupun kepada masyarakat.

**Para hadirin yang saya hormati,**

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian PANRB terhadap 616 K/L/D, indeks SPBE Nasional mencapai nilai 1,98 (Cukup) dari target yang diharapkan sebesar 2,6 (Baik). Hal ini menunjukkan tantangan pemerintah cukup besar yaitu kondisi proses bisnis yang belum terintegrasi antar K/L/D, penerapan sistem aplikasi dan infrastruktur TIK berjalan masing-masing di K/L/D, dan banyak duplikasi sistem aplikasi yang dibangun antar K/L/D, sehingga berdampak pada inefisiensi anggaran belanja TIK secara nasional.

Sebagai langkah konkrit pemerintah dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan ini merupakan platform kebijakan digitalisasi pemerintahan untuk keterpaduan langkah dalam pembangunan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. SPBE hadir sebagai *tools* pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, mewujudkan penyelenggaraan SPBE yang terpadu, serta meningkatkan efisiensi belanja pemerintah di bidang TIK.

Untuk mencapai tujuan Perpres SPBE tersebut, arah kebijakan pembangunan SPBE akan menekankan pada 4 (empat) area kunci, yaitu: pertama, penguatan tata kelola SPBE dan kebijakan SPBE dimana setiap K/L/D membangun tata kelola SPBE yang terpadu dan mampu berkolaborasi antar Instansi Pemerintah; kedua, peningkatan kualitas layanan SPBE agar mampu merespon kebutuhan publik yang dinamis; ketiga, pembangunan Pusat Data Nasional yang dapat digunakan oleh semua instansi pemerintah sehingga mampu mewujudkan integrasi data pemerintah dan optimalisasi penggunaan aplikasi umum; dan keempat, pengembangan *leadership* dan kompetensi SDM di bidang SPBE melalui pengembangan jabatan fungsional yang mendukung berbagai pekerjaan terkait SPBE.

**Hadirin sekalian yang saya hormati,**

LKPP telah nyata berperan dalam penyelenggaraan SPBE, khususnya dalam upaya penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Peran tersebut saat ini dirasa sudah berjalan baik karena LKPP telah mampu menunjukkan praktik terbaik (*best practice*) dalam mentransformasi layanan utamanya melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang terintegrasi dan diterapkan hampir di semua Instansi Pemerintah. Dari hasil Evaluasi SPBE tahun 2018, tingkat kematangan layanan pengadaan secara elektronik telah mencapai rata-rata indeks 3,61 yang artinya telah menerapkan integrasi layanan pengadaan secara elektronik. Hal tersebut telah mengakselerasi pelayanan pemerintahan yang sangat terasa manfaatnya kepada dunia usaha dan pemerintah.

Di dalam Perpres SPBE, LKPP diberi peranan yang penting dalam rangka melaksanakan Percepatan SPBE khususnya integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagai satu kesatuan siklus proses dalam *Government Resource Management System* (GRMS). LKPP hendaknya segera melakukan kolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Koordinator Percepatan SPBE tersebut bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.



Target penyelesaian percepatan SPBE dapat dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai amanat Perpres SPBE.

**Hadirin sekalian yang saya banggakan,**

Kita tentu berharap dengan akselerasi transformasi digital di instansi pemerintah melalui penerapan SPBE yang terpadu, mampu menjawab tantangan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, efektif, dan berkinerja tinggi. Namun demikian, guna beradaptasi dengan otomatisasi dan transformasi digital, pembangunan ASN menjadi kunci utama perbaikan birokrasi agar semakin adaptif menjawab dinamika, tantangan, harapan maupun pencapaian tujuan bangsa dan negara.

Pembangunan ASN ditujukan untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2024 sebagaimana fokus pemerintahan terhadap pembangunan SDM 5 tahun ke depan (2020-2024). Untuk mewujudkan prioritas kerja pemerintah tersebut, diperlukan smart ASN yang mampu melaksanakan program pemerintahan secara profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, berjiwa melayani, punya jejaring luas, serta memiliki nasionalisme dan integritas yang tinggi.

Saat ini, Indonesia memiliki 4.287.526 ASN, dengan proporsi ASN yang masih belum berimbang karena didominasi oleh jabatan pelaksana (administrasi umum) sebanyak 1,6 juta. Padahal kebutuhan ASN diprioritaskan pada pemenuhan tenaga di bidang pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, teknis kekeahlian spesifik) sebagai upaya mendukung pembangunan nasional dan daerah. Oleh karenanya, diperlukan restrukturisasi agar ASN didominasi jabatan fungsional teknis dan kekeahlian profesional.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Nomor 49 Tahun 2018, maka hanya ada 2 (dua) status pegawai pemerintah, yaitu PNS dan PPPK. Dengan PP 49/2018, perekrutan ASN dimungkinkan pula melalui jalur PPPK yang bertujuan untuk menghadirkan pegawai yang profesional, fleksibel, multi level entry, dan siap bekerja (*ready for use*) guna meningkatkan kapasitas organisasi dan akselerasi pembangunan nasional.

**Hadirin yang saya hormati,**

Pemerintah fokus pada Reformasi Manajemen ASN sesuai UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, PP Manajemen PNS Nomor 11 Tahun 2017, dan PP Manajemen PPPK Nomor 49 Tahun 2018, melalui langkah kebijakan strategis pembangunan SDM yang terdiri dari:

- Perencanaan ASN disesuaikan arah pembangunan nasional dan potensi daerah, serta *core business* instansi.
- Pengadaan ASN melalui rekrutmen dan seleksi berbasis komputer, serta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi.
- Pengembangan kompetensi ASN dengan penetapan standar kompetensi jabatan dan transformasi diklat konvensional menjadi *corporate university*.
- Penilaian kinerja dan penghargaan melalui PP penilaian kinerja PNS Nomor 30 Tahun 2019 dengan metode penilaian 360°.
- Pengembangan karier berdasarkan sistem merit.
- Peningkatan kesejahteraan melalui reformasi sistem gaji, tunjangan, dan fasilitas, serta pensiun dan jaminan hari tua.

Pembentukan struktur ideal ASN akan didukung penerapan manajemen talenta ASN yang kini telah selesai uji publik. Manajemen talenta ASN memungkinkan akselerasi pencapaian tujuan pembangunan nasional karena talenta seluruh instansi akan dihimpun dalam talent pool nasional sehingga hanya talenta terbaik yang sangat potensial dan berkinerja di atas ekspektasi yang dapat menduduki jabatan kritikal sehingga dapat berkontribusi optimal dalam membangun bangsa.



**Hadirin sekalian yang saya banggakan,**

Optimisme perlu terus kita gelorakan pada semua level kepemimpinan agar memberikan sumbangsih konkrit dalam akselerasi reformasi birokrasi. Saya selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berterima kasih kepada Kepala LKPP atas penyelenggaraan Rakor ini dan sangat mengapresiasi kegiatan ini. Semoga momentum ini dapat diterapkan secara menyeluruh, sistematis, dan dinamis di lingkungan LKPP untuk terwujudnya harmonisasi penerapan SPBE nasional pada khususnya dan kemajuan negara dan bangsa pada umumnya.

Terima Kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Tjahjo Kumolo**



**Sambutan Penyampaian Hasil Evaluasi  
dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah I Tahun 2019**  
Batam, 7 November 2019

**Assalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,  
Salam Sejahtera untuk Kita Semua,**

**Yang saya hormati:**

- Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota Batam, dan Kapolda Kepulauan Riau;
- Para Gubernur, Bupati dan Wali Kota di Lingkup Wilayah I;
- Para Narasumber, Prof. Dr. Eko Prasjojo serta Saudara Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor;
- Deputi Bidang Pelayanan Publik, Sekretaris Kementerian PANRB, para Deputi dan Staf Ahli Kementerian PANRB;
- Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
- Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI;
- Para Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Wilayah I; serta
- Para Sekretaris Daerah, Kepala Biro dan Kepala Bagian Organisasi Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah I.

**Hadirin serta undangan yang berbahagia,**

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan di acara "Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah I Tahun 2019".

**Saudara-saudara sekalian,**

Visi Indonesia Maju yang disampaikan dalam pidato Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, telah menjadi visi dan harapan kita bersama. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan reformasi pelayanan publik yaitu terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing global. Pelayanan Publik dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan segala perubahan yang cepat, penuh risiko, penuh kompleksitas, dan kejutan. Kita sudah menjadi bagian dari *the global village* atau *kampung global*, dimana perkembangan dan kemajuan teknologi yang terjadi di belahan dunia lain, mau tidak mau, suka tidak suka, akan mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat kita. Harapan dan keinginan masyarakat terhadap pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam 10 tahun terakhir. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara hidup, cara berpikir dan berinteraksi masyarakat. Hal ini berimplikasi pada keinginan dan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang serba mudah, cepat, dan terjangkau.

Perkembangan penyelenggaraan pelayanan publik saat ini wajib menganut paradigma *New Public Service* dimana masyarakat merupakan pusat dari penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintah. Aspirasi masyarakat menjadi referensi utama dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan sistem pelayanan publik. Pelayanan publik diharapkan mampu membaca dan menjawab keinginan dan harapan masyarakat tersebut sehingga pelayanan publik mendapatkan kepercayaan masyarakat yang merupakan modal utama untuk kelangsungan pembangunan bangsa.

**Saudara-saudara yang saya hormati,**

Langkah untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang responsif dan berdaya saing global, telah dimulai sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan



pelaksanaannya. Dalam UU ini, diatur berbagai prinsip yang terkait dengan hak, kewajiban, dan larangan masyarakat dan penyelenggara pelayanan terutama kewajiban pokok penyelenggara (Pemerintah) untuk menyelenggarakan pelayanan prima yang akuntabel, nyaman, mudah, cepat, dan terjangkau. Upaya dan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik harus dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan kebutuhan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Wajah pelayanan publik harus kita ubah dari yang berbelit-belit, lamban, tidak ramah, dan sarat pungutan liar (pungli) menjadi pelayanan publik yang modern, bersih, efisien, dan dinamis menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat. Tanpa kondisi ini, kita tidak pernah akan menjadi negara yang maju.

Tuntutan masyarakat akan hadirnya pelayanan publik yang berkualitas dan profesional menjadi alasan mendasar bagi pemerintah untuk melakukan percepatan dalam reformasi pelayanan publik. Reformasi birokrasi menjadi salah satu prioritas dalam proses pembangunan nasional. Bapak Presiden menekankan bahwa proses penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas.

**Saudara-saudara yang saya hormati,**

Dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin mendorong seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk secara bertahap mengembangkan pelayanan publik yang terintegrasi secara sistem. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan berbagai pelayanan dapat diakses dengan mudah dan efisien, khususnya pelayanan-pelayanan dasar seperti pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan, pelayanan kesehatan, dan urusan SAMSAT. Konsep Pemerintah Dilan “Digital Melayani” yaitu reformasi pelayanan berbasis elektronik harus diterapkan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien harus diterapkan pada semua unit penyelenggara pelayanan dasar.

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPM-PTSP) merupakan unit pelayanan vital yang saat ini menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi pelayanan publik, dilihat dari tingkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*). DPM-PTSP harus banyak berbenah, baik secara fisik (sarana dan prasarana pelayanan) maupun secara infrastruktur IT, serta harus selalu melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan sehingga jika ada yang dinilai mempersulit proses pelayanan masyarakat, diupayakan untuk dilakukan penyederhanaan.

Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan pelayanan bagi setiap penduduk dari mulai lahir hingga meninggal dunia. Data dan informasi kependudukan menjadi suatu hal yang harus dikelola dengan akurat, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyelenggaraan program-program pemerintah. Saya mendorong pemanfaatan data bersama oleh unit-unit penyelenggara pelayanan sehingga masyarakat tidak dibebani dengan dokumen-dokumen yang pernah diberikan. Pemanfaatan data bersama ini tentunya dengan unit-unit penyelenggara pelayanan lain seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perizinan, pelayanan Keimigrasian, dan pelayanan Kepolisian.

Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) didorong untuk mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) sehingga pelayanan-pelayanan medis dan informasi rekam medik dapat dibuat secara *digital* untuk meningkatkan keakuratan informasi dan kecepatan penyediaan informasi, mengingat pelayanan RSUD yang sangat vital untuk kesehatan masyarakat. Selain itu, perlu ditingkatkan kualitas kenyamanan dan kebersihan sarana dan prasarana rumah sakit, sehingga tidak kalah dengan rumah sakit non-pemerintah.



Pelayanan SAMSAT harus didorong untuk memanfaatkan sistem informasi secara optimal. Sudah banyak SAMSAT yang melakukan inovasi untuk menyediakan pelayanan yang lebih efisien dan bebas dari pungutan liar. Proses pembayaran bekerjasama dengan perbankan dan pihak swasta serta menggunakan sistem *online*, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna layanan.

Untuk itu, tentunya perlu dukungan infrastruktur dan kapasitas SDM yang memadai untuk dapat mengembangkan sistem pelayanan publik modern berbasis teknologi informasi. Perlu alokasi anggaran khusus untuk tenaga IT dan pembangunan infrastruktur. Perlu alokasi khusus untuk peningkatan kenyamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, perlu pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan budaya *hospitality* dan profesionalisme petugas pelayanan, sehingga kita benar-benar mampu mewujudkan pelayanan publik yang paripurna dan dipercaya oleh masyarakat.

Mari menciptakan kondisi-kondisi dimana unit-unit penyelenggara pelayanan dapat secara leluasa melakukan terobosan dan inovasi yang dilahirkan untuk menjadi solusi yang berdampak pada kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat.

**Saudara-saudara sekalian,**

Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebagai Pembina dan Penanggungjawab Penyelenggaraan Pelayanan Publik di daerah, memiliki peran yang sangat penting sebagai motor penggerak terjadinya terobosan-terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu, perlu secara intensif membangun komunikasi dan kolaborasi yang efektif dengan unit-unit pelayanan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.

Kementerian PANRB selama ini selalu membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah khususnya dalam upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Saya mendorong agar hubungan mitra kerja ini terus terjalin dalam penerapan kebijakan pelayanan publik yang modern dan inovatif di daerah.



**Saudara-saudara yang saya hormati,**

Pelayanan publik harus dapat diakses oleh semua pihak, tanpa memandang kondisi sosial, ekonomi, budaya bahkan keterbatasan secara fisik. Undang-Undang Pelayanan Publik mengamanatkan adanya fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, antara lain wajib untuk menyediakan peralatan dan fasilitas mulai dari tempat parkir, loket pelayanan, toilet khusus, ruang laktasi, area bermain anak, dan lain-lain. Bahkan pelayanan yang berbasis internet kini juga sudah menyediakan fitur-fitur yang mampu membantu pengguna layanan dengan keterbatasan penglihatan. Penyelenggaraan pelayanan publik tidak boleh setengah-setengah. Pelayanan publik yang paripurna adalah pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak, tanpa terkecuali. Inilah yang disebut dengan pelayanan publik yang responsif!

Terakhir, saya ingin mengingatkan kembali beberapa poin yang ditegaskan oleh Bapak Presiden untuk kita semua sebagai pelayan publik, agar menghindari tindakan koruptif, agar bekerja cepat, bekerja keras, bekerja produktif, dan jangan terjebak rutinitas yang monoton. Bekerja dengan orientasi hasil, serta selalu cek masalah di lapangan dan temukan solusinya. Semuanya kita lakukan agar publik merasakan dan menikmati pelayanan publik yang berkualitas.

Pada akhirnya, saya menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Kepala Daerah atas dedikasi dan upaya yang dilakukan terus-menerus untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah membagikan pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kita semua yang hadir disini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan secara khusus kepada Wali Kota Batam beserta jajarannya atas kerja sama dan kolaborasi yang sangat baik sehingga acara ini dapat terlaksana. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridai upaya terbaik pelayanan kita bagi bangsa dan negara.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.,*

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Tjahjo Kumolo**



**POINTERS KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020 – 2024  
DISAMPAIKAN PADA RAKORNAS KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Bogor, 13 November 2019

1. Visi Presiden tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Presiden memiliki 9 misi yaitu:
  - 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
  - 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
  - 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
  - 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
  - 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
  - 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
  - 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
  - 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
  - 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
  
2. Presiden juga memberikan arahan 5 Prioritas Kerja Pemerintah 5 tahun ke depan, yaitu:
  - a. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.  
Interkoneksi infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
  - b. Pembangunan Sumber Daya Manusia.  
Membangun SDM yang pekerja keras dan dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta, serta mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita;
  - c. Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja.  
Segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua UU besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
  - d. Reformasi Birokrasi.  
Penekanan pada kecepatan melayani dan mempercepat perizinan investasi secara transparan, cepat dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Aparatur pemerintah secara efektif efisien dan aktif mampu menggerakkan dan mengorganisir elemen masyarakat.
  - e. APBN yang fokus dan tepat sasaran.  
APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  
3. Kebijakan strategis bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 – 2024 tidak akan terlepas dari visi dan misi sebagaimana digariskan oleh Presiden, antara lain membangun transparansi tata kelola pemerintahan, menjalankan reformasi birokrasi, dan membuka partisipasi publik. Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi.
  
4. Atas dasar arahan tersebut, saya sampaikan beberapa poin penting, sebagai berikut:



a. Kita akan terus berupaya meningkatkan kualitas SDM ASN. Upaya-upaya yang harus kita lakukan antara lain:

1) Rekrutmen tenaga-tenaga ASN yang baru.

Jumlah PNS saat ini yaitu 4,28 juta. Jumlah tersebut masih didominasi oleh Tenaga Administratif yang mencapai 39%, sehingga perlu dilakukan penyesuaian struktur/keahlian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah, yaitu:

a) Perencanaan kebutuhan SDM ASN harus benar-benar memperhatikan kebutuhan. Dari tahun 2014 hingga kini kita sudah merekrut sekitar lebih dari 317.979 PNS. Pada tahun ini kita merencanakan untuk menerima 197.111 CPNS. Diharapkan pada tahun 2020 kita memiliki sekitar 500.000 PNS potensial, sehingga tahun



2024 nanti diharapkan seperempat dari SDM kita adalah SDM yang potensial, yang dipilih dengan proses yang ketat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan;

b) Proses rekrutmen CPNS yang akan dilakukan dalam waktu dekat harus benar-benar dikendalikan, diawasi, dan dipastikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, transparan, bersih dari kemungkinan penyimpangan, dan terbuka bagi masyarakat. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menjaga agar jangan sampai kepercayaan masyarakat yang telah berhasil dibangun selama ini runtuh karena tindakan yang merusak.

Apabila ada aparat yang menjanjikan seseorang dapat diterima menjadi CPNS dengan membayar sejumlah uang tertentu, maka dipastikan bahwa dia oknum yang tidak bertanggungjawab. Jika ditemukan hal semacam ini, laporkan dan kita akan usut.

c) Mempersiapkan proses rekrutmen sebaik mungkin, melakukan mitigasi risiko sehingga setiap kemungkinan buruk bisa diantisipasi. Kami ingin proses penerimaan CPNS semakin baik dari tahun ke tahun, sehingga para CPNS yang diterima juga semakin berkualitas, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas birokrasi kita;

d) Semua instansi hendaknya menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan.

2) Memperbaiki sistem pengembangan pegawai. Setiap instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Mematuhi kewajiban untuk memberikan pengembangan SDM ASN masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, minimal 20 jam per tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga agar para ASN tetap memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kemajuan;

b) Mengembangkan sistem pengembangan internal yang berbasis elektronik *e-learning*. Bisa dikembangkan melalui modul-modul yang disediakan dalam bentuk *softcopy*, slide-slide paparan, video-video instruksional, video cerita keberhasilan, video sosialisasi, dan lainnya, yang semuanya disimpan di internet dan media sosial sehingga dapat akses oleh semua pegawai, kapan saja serta dimana saja;



- c) Membangun sistem kaderisasi, dan alih pengetahuan sehingga tidak terjadi kekosongan pimpinan yang memiliki kompetensi sesuai standar yang dibutuhkan instansi. Setiap pejabat di daerah setidaknya menyiapkan calon-calon pimpinan penggantinya sehingga proses kaderisasi tidak terputus.
  - d) Mengirimkan calon-calon pemimpin di masing-masing instansi untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional, agar dapat menjadi bagian dari calon-calon pemimpin nasional yang menjadi aset bangsa dan negara.
- 3) Mengembangkan manajemen talenta nasional. Setiap instansi pemerintah juga saya meminta untuk mengembangkan manajemen talenta masing-masing sehingga dapat menjadi bagian dari manajemen talenta nasional. Suatu saat talenta-talenta dari satu instansi akan menjadi talenta nasional yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian prioritas pembangunan.
- 4) Memperkuat revolusi mental ASN di instansi pemerintah. Setiap instansi juga harus melakukan revolusi mental ASN di lingkungannya masing-masing agar ASN memiliki kemampuan bekerja keras, ulet, dinamis, berintegritas, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan, kreatif dan selalu berinovasi sehingga membuat pemerintahan menjadi lebih berkualitas, dan mampu menghadapi tantangan global.
- b. Melakukan upaya-upaya penyederhanaan regulasi.  
Upaya ini dilakukan untuk mengurangi jerat aturan sehingga membuka peluang kita untuk melakukan inovasi sepanjang diperlukan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, mengurangi tumpang tindih dan kontradiksi antar satu aturan dengan aturan lainnya.  
Berdasarkan data yang ada saat ini (dari tahun 1946 sampai saat ini) terdapat 38.827 peraturan perundang-undangan.

No.	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Jumlah
1	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	180
2	Undang-Undang	1684
3	Peraturan Pemerintah	4551
4	Peraturan Presiden	1998
5	Peraturan Menteri	14.449
6	Peraturan Daerah (dari tahun 1971 – sekarang)	15.965
	Jumlah	38.827

Data ini memperlihatkan bahwa kita sudah terlalu banyak memproduksi peraturan-peraturan yang tumpang tindih sehingga memang perlu kita sederhanakan agar birokrasi kita bisa “berlari” lebih cepat lagi.

Penyederhanaan ini dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi masing-masing, menghapus yang sudah tidak berlaku, mengidentifikasi yang saling berbenturan baik peraturan teknis maupun yang lebih tinggi, termasuk peraturan yang bersifat lintas sektoral. Hal ini diperlukan dalam rangka menyusun *omnibus law*, yang akan mengatur seluruh tumpang tindih dan ketidaksinkronan berbagai peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengajuan rancangan UU tidak boleh secara tegas/eksplisit menyebutkan pembentukan kelembagaan tertentu dengan nomenklatur yang disebutkan secara jelas. Pembentukan



kelembagaan/organisasi menjadi kewenangan Presiden, karena itu jika memang diperlukan untuk memperkuat kelembagaan, maka cukup menyebutkan instansi yang memiliki kewenangan di bidang tersebut.

- 3) Menyederhanakan berbagai peraturan yang terkait dengan pelayanan perizinan.
- c. Melakukan upaya-upaya untuk penyederhanaan eselonisasi. Penyederhanaan eselonisasi ditujukan untuk mengurangi hierarki proses pengambilan keputusan, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan tanpa mengurangi hak-hak mereka yang sudah menduduki jabatan eselon III, IV dan V. Dengan cara seperti ini diharapkan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan akan semakin cepat dan dinamis.
- Sebagai pimpinan daerah, kita semua harus berhati-hati dalam memberikan respon terhadap pemberitaan negatif terkait penyederhanaan ini. Kita sedang melakukan analisis mendalam mengenai hal ini. Sambil menunggu hasil analisis, saya meminta semua kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau sekretaris daerah sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB) untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Mengidentifikasi unit-unit kerja yang memungkinkan untuk dilakukan penyederhanaan;
  - 2) Unit-unit pelayanan akan menjadi target utama dalam rangka memperpendek proses pelayanan;
  - 3) Mengidentifikasi jabatan-jabatan fungsional yang sesuai untuk menggantikan jabatan Eselon III dan IV;
  - 4) Melakukan analisis dampak risiko yang ditimbulkan, termasuk dampak keuangan;
  - 5) Bagi instansi pemerintah yang menjadi pembina jabatan fungsional, diminta untuk melakukan langkah-langkah penguatan jabatan fungsional, termasuk tugas-tugas yang akan menggantikan jabatan eselon III dan IV.
- d. Menata organisasi dan tata laksana. Untuk merespon arahan Presiden, diperlukan pemerintahan yang lincah (*agile*), yang mampu bergerak cepat, mampu menyesuaikan diri secara cepat terhadap perubahan lingkungan global. Sudah banyak daerah-daerah tingkat kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia yang menjadi sorotan dunia karena kemampuannya berinovasi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Karena itulah, kita harus terus menerus melakukan upaya menata organisasi, dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- e. Menerapkan manajemen kinerja. Penerapan manajemen kinerja bertujuan untuk memastikan bahwa program-program pembangunan tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan kemajuannya dapat dimonitor. Oleh karena itu, setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Memastikan bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah/rencana strategis masing-masing sejalan dan selaras dengan visi misi dan target-target nasional dan daerah;
  - 2) Setiap organisasi perangkat daerah harus memiliki target-target yang sejalan dengan target pembangunan daerah di daerahnya masing-masing. Sesuai dengan arahan Presiden, setiap pejabat memiliki tanggung jawab dalam pencapaian target pembangunan daerah. Maka, Pimpinan Daerah harus benar-benar memilih pejabat yang memiliki kemampuan untuk memenuhi target-target dimaksud. Dengan



- penilaian yang obyektif, siapa saja yang tidak mampu memenuhi target-target ini, dapat digantikan oleh pejabat lain yang dipandang lebih memiliki kemampuan;
- 3) Para pimpinan daerah agar selalu mengawasi para pimpinan organisasi perangkat daerah yang memiliki akses untuk menetapkan kegiatan-kegiatan dalam lingkup tugasnya. Upaya-upaya mengalihkan anggaran, menyisipkan kegiatan-kegiatan 'siluman', atau melakukan kegiatan yang tidak sejalan dengan target-target pembangunan harus dihilangkan. Semua anggaran yang dipercayakan kepada kita harus digunakan untuk kemanfaatan masyarakat.
  - 4) Dalam waktu dua bulan tersisa untuk tahun 2019 ini, saya mengharapkan kita semua bekerja keras untuk mempercepat upaya pencapaian target-target pembangunan dalam periode 5 tahun kedepan.

Terima Kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Tjahjo Kumolo**



**SAMBUTAN DALAM ACARA PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI DAN PENGHARGAAN  
PELAYANAN PUBLIK LINGKUP POLRES/POLRESTA/POLRESTABES/POLRES METRO  
TAHUN 2019**

Jakarta, 20 November 2019

*Assalamualaikum Wr. Wb.,*  
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang saya hormati:**

- Kapolri – Jenderal Polisi Idham Azis;
- Para Deputy dan Staf Ahli di Lingkungan Kementerian PANRB;
- Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, dan Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
- Para Kapolda; serta
- Kapolres, Kapolresta, Kapolrestabes, dan Kapolres Metro.

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal'afiat guna mengikuti kegiatan "Penyampaian Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Lingkup Polres/Polresta/ Polrestabes/Polres Metro Tahun 2019".

**Bapak/Ibu yang saya hormati,**

Institusi Kepolisian lebih dikenal sebagai Aparat Penegak Hukum. Meskipun demikian, kepolisian juga merupakan salah satu institusi yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.



Hal tersebut sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang mengatur "bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara dan dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi

*manusia*". Oleh karena itu, pelayanan kepada masyarakat menjadi perhatian khusus, sebagaimana pula telah disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa "tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan".



**Hadirin yang saya hormati,**

Saat ini penyelenggaraan pelayanan publik telah menganut paradigma *New Public Service*, dimana masyarakat merupakan pusat dari penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan. Aspirasi masyarakat menjadi referensi utama dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan sistem pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik diharapkan mampu membaca dan menjawab keinginan dan harapan masyarakat, sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat yang merupakan modal utama untuk keberlangsungan pembangunan bangsa.

**Bapak Kapolri dan hadirin yang saya hormati,**

Tantangan yang kita hadapi saat ini, baik secara sosial maupun ekonomi semakin kompleks. Kemajuan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat menyebabkan perubahan sosial, yakni perubahan cara hidup, cara berpikir, dan cara berinteraksi dalam masyarakat. Hal ini berimplikasi pada keinginan dan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang serba mudah, cepat, dan terjangkau. Kita semua dituntut untuk semakin kreatif dalam menemukan cara-cara baru dalam menyelesaikan berbagai isu, khususnya dalam hal memenuhi kebutuhan pelayanan di tengah masyarakat yang semakin beragam.

Sebagaimana Bapak Presiden juga berpesan dalam pidato beliau, bahwa *“dalam dunia usaha yang penuh risiko, yang sangat dinamis dan kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan, inovasi adalah budaya”*. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami tidak henti-hentinya mendorong Kepolisian RI untuk terus mengembangkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pelayanan publik, sehingga dapat terus menjawab kebutuhan pelayanan publik.

Selain memberikan dampak pada perubahan sosial, kemajuan teknologi informasi juga dapat mendorong terciptanya inovasi dan terbangunnya sistem pelayanan terintegrasi, sehingga menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, sederhana, dan mudah sesuai harapan masyarakat.

**Saudara-saudara yang saya hormati,**

Kehadiran Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro di seluruh Indonesia berkontribusi besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yakni untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, menciptakan kondisi perekonomian yang stabil, menimbulkan kepercayaan masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya bukan pekerjaan mudah, dibutuhkan komitmen dari semua pihak serta konsistensi dalam penerapan kebijakan pelayanan publik, dan kesungguhan para pemimpin untuk mendorong pembangunan sistem-sistem kerja dan penerapan kebijakan pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat. Kepolisian harus mampu menggandeng unsur-unsur masyarakat serta berkolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintah maupun swasta lain untuk aktif terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin baik. Masyarakat hendaknya tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pengguna layanan, melainkan sebagai pihak yang dapat diajak bekerja sama untuk menentukan arah kebijakan pelayanan publik untuk kemajuan bersama. Perspektif pelayanan publik harus kita arahkan pada terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing global.

Kita harus optimis bahwa kita mampu menjadi sebuah negara maju, karena Indonesia adalah negara besar yang memiliki potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Setiap pemimpin harus menyadari hal ini agar mampu mengarahkan potensi-potensi tersebut ke arah perkembangan yang positif, sehingga perlahan-lahan masyarakat kita akan melihat bahwa pemerintah berhasil membawa bangsa ini kepada cita-cita luhur yang dititipkan oleh para pendiri bangsa ini. Kita tidak boleh tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, yang sudah terbukti menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya kemajuan dari aspek perekonomian dan telah diakui



secara internasional. Singapura, yang dekat dengan Indonesia, berhasil menduduki peringkat ke-2 dalam kemudahan berusaha karena memiliki kepastian pelayanan yang andal.

Sekali lagi, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk yakin bahwa *"kita bisa, jika kita mau"*. Kita semua memiliki peran, tanggung jawab, dan potensi. Tetapi kita tidak punya banyak waktu. Oleh karena itu, mari kita gunakan setiap kesempatan untuk terus mengembangkan kemampuan diri untuk bersaing ke arah yang positif dalam mewujudkan visi bersama, yaitu Indonesia Maju.

Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan kembali beberapa poin yang ditegaskan oleh Bapak Presiden untuk kita semua sebagai pelayan publik, yakni agar menghindari tindakan koruptif, bekerja cepat, bekerja keras, bekerja produktif, dan jangan terjebak rutinitas yang monoton. Kita juga harus bekerja dengan orientasi hasil, serta selalu meninjau masalah di lapangan dan menemukan solusinya. Semuanya kita lakukan agar publik merasakan dan menikmati pelayanan publik yang berkualitas.

Terakhir, saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kapolres, Kapolresta, Kapolrestabes, dan Kapolres Metro yang hadir pada hari ini, atas dedikasi dan upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Secara khusus, kami sampaikan selamat kepada para Kapolres, Kapolresta, dan Kapolrestabes yang ditetapkan sebagai Penerima Penghargaan Pelayanan Publik. Semoga terobosan dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik terus berkembang dan menjadi budaya, serta menjadi inspirasi bagi unit layanan lainnya di kepolisian.

Sekian dan Terima Kasih.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Tjahjo Kumolo**



**POINTERS PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI  
DAN PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK WILAYAH II TAHUN 2019**

Jakarta, 22 November 2019

**Assalamualaikum Wr. Wb.,**

**Yang saya hormati:**

- Para Kepala Paguyuban: Ketua KASN, Kepala BKN, Kepala LAN, dan Plt. Kepala ANRI;
- Sekretaris Kementerian PANRB, Para Deputi, dan Staf Ahli Kementerian PANRB;
- Para Bupati dan Wali Kota atau yang mewakili;
- Narasumber: Bupati Banyuwangi, Bapak Abdullah Azwar Anas;
- Para Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau yang mewakili;
- Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah;
- Insan Pers dan Media; serta
- Hadirin tamu undangan yang berbahagia.

1. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah terwujudnya pelayanan publik yang baik, yaitu pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. Arahan Bapak Presiden terkait dengan reformasi birokrasi ada dua, yaitu (1) mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif dan efisien kepada publik, dan (2) mempercepat proses perizinan.
3. Dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan visimisi Bapak Presiden dan Wakil Presiden adalah membangun tata kelola yang efektif dan efisien baik ditingkat pusat maupun daerah.
4. Pelayanan publik dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan segala perubahan yang cepat, penuh risiko, penuh kompleksitas, dan kejutan. Terutama terkait dengan kemajuan teknologi informasi.
5. Pidato Presiden RI (20 Oktober 2019): *“dalam dunia usaha yang penuh risiko, yang sangat dinamis dan kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan, inovasi adalah budaya. Mendobrak rutinitas adalah satu hal. Meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas. Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi hasil-hasil yang nyata. Tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan”*.
6. Pelayanan publik tidak mampu berdiri sendiri. Semangat revolusi mental jangan sampai padam agar masyarakat tidak kehilangan harapan dan kepercayaan kepada pemerintah.
7. Pimpinan memegang peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Para pemimpin (khususnya kepala daerah) harus memiliki komitmen untuk menuntun dan memberi motivasi bagi jajarannya agar bergerak cepat, kreatif, inovatif, dan profesional dalam melakukan perbaikan pelayanan.
8. Kepala daerah dan sekretaris daerah sebagai pembina dan penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, memiliki peran sangat penting sebagai motor



penggerak terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu secara intensif membangun komunikasi dan kolaborasi yang efektif dengan unit-unit pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima.



9. Kegiatan evaluasi unit penyelenggara pelayanan publik oleh Kementerian PANRB ini hanya menjadi alat penggerak roda pemerintahan menuju pelayanan publik berkelas dunia. Diharapkan kegiatan ini dapat memacu semangat para pimpinan daerah dan pihak terkait.
10. Unit pelayanan publik yang sudah memperoleh nilai yang baik, agar tidak terlena dan berpuas diri. Bagi yang belum memperoleh nilai memuaskan, agar dapat terus berbenah untuk perbaikan.
11. Saran perbaikan yang telah disampaikan oleh tim evaluator diharapkan menjadi semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
12. Kami mengamati bahwa reformasi birokrasi telah dilakukan. Namun, mayoritas masih pelaksanaan ditingkat kulit. Arahan Presiden agar pelaksanaan reformasi birokrasi sampai ke jantung-nya.
13. Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah tidak memangkas birokrasi, tetapi merampingkan birokrasi. Hal ini harus dilaksanakan dengan hati-hati dan cermat. Sehingga, harus diidentifikasi jabatan-jabatan mana yang harus menjadi fungsional dan mana yang struktural. Misalnya, Kepala Kelurahan, Kepala Kecamatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kantor, dan sebagainya.
14. Beberapa capaian pelayanan publik pada tahun 2019, diantaranya:
  - a. Telah terbentuk 17 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia.
  - b. Gerakan *One Agency One Innovation* semakin meningkatkan minat instansi pemerintah dalam mengembangkan inovasi. Diawali pada tahun 2014 terjaring 515



proposal inovasi, kemudian setiap tahun terus meningkat hingga pada tahun 2019 terjaring sebanyak 3.156 proposal inovasi. Sehingga, sampai saat ini total ada 13.214 proposal inovasi.

- c. Terkait inovasi, Indonesia telah memperoleh beberapa penghargaan dari UNPSA (Badan PBB yang menangani pelayanan publik), seperti inovasi pengendalian malaria melalui Sistem Edat Kabupaten Teluk Bintuni dan inovasi "PetaBencana.id" dari BNPB.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.,*

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Tjahjo Kumolo**



**SAMBUTAN MENTERI PANRB PADA MINISTERIAL ROUNDTABLE MEETING  
DALAM RANGKA ASEAN-KOREA COMMEMORATIVE SUMMIT**

Busan, 26 November 2019

*Assalamualaikum, Wr. Wb.,*  
Salam Sejahtera bagi Kita Semua.

- *His Excellency Minister Of Internal Security And Public Administration Of The Republic Of Korea.*
- *His Excellency Minister Concerning Of Public Administration From Asean Countries;*
- *Honorable Ladies And Gentlemen.*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, kita bersilaturahmi dalam acara *Ministerial Roundtable Meeting* dalam rangka *ASEAN-Korea Commemorative Summit* memperingati hubungan baik Korea dengan negara-negara ASEAN.

Saya mengucapkan selamat kepada *His Excellency Minister of Internal Security and Public Administration of The Republic of Korea* yang dengan konsisten menyelenggarakan acara ini. Saya menilai pertemuan ini sangat produktif untuk melakukan evaluasi dan menghasilkan gagasan untuk memajukan hubungan baik antara Republik Korea dengan negara-negara ASEAN.

**Bapak dan ibu yang saya hormati,**

Indonesia melihat bahwa pemerintah dan masyarakat adalah elemen bangsa utama dalam rangka membuat dan mengimplementasikan kebijakan publik. Seluruh generasi dari pemerintah dan masyarakat harus siap menghadapi “badai” ketidakpastian dan perubahan global serta tantangan kemanusiaan yang universal seperti: 1) resesi ekonomi global yang disertai revolusi konsumen (peningkatan jumlah *middle class* dan *fluent consumer* menjadi 141 juta jiwa tahun 2020). Pemerintah daerah harus mengoptimalkan peluang, jangan sampai diambil pihak luar; 2) urbanisasi skala besar dan global; 3) menipisnya sumber daya alam; 4) perubahan iklim dan cuaca ekstrem; serta 5) disrupsi teknologi, digitalisasi dan pengetahuan.

Sekali lagi kami menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang dibangun oleh tiga pilar yaitu pemerintah, masyarakat dan sektor privat (*open government*) dikuatkan, agar dapat melihat dan menjalankan peran strategis dalam mengatasi masalah, serta menyeimbangkan program pemerintah dengan harapan masyarakat dan membuat lompatan besar “melampaui ketidakpastian dan perubahan”.

Melalui kerangka *open government* yang dibangun adalah kolaborasi, sinergi, soliditas dan *trust*. Masyarakat percaya dengan pemerintah, lalu pemerintah juga makin percaya diri menjalankan program sehingga masyarakat dan pemerintah saling mendukung pertumbuhan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah. Inilah kunci utama membangun kesiapan pemerintah untuk mengarungi dinamika di masa mendatang.

**Bapak dan ibu sekalian,**

Salah satu point utama membangun kepercayaan publik adalah menyediakan saluran komunikasi pemerintah dengan masyarakatnya. Karena eranya bergeser ke arah teknologi dan digitalisasi, maka saluran itu harus adaptif dengan teknologi agar fleksibel menangkap harapan masyarakat di ruang milenial.

Sebagai contoh riset **UK Big Innovation Centre** menyebut keterbukaan akses data (publik, bisnis, pelayanan) membuat pemerintah lebih efektif. Singapura melakukan “**smartnation**” yaitu transformasi



pemerintahan digital dengan tetap melayani publik melalui sentuhan personal (teknologi hanya sebagai sarana). Di Denmark untuk mengatasi penuaan penduduk membangun kepercayaan dengan menggunakan *artificial inteligent* dan *big data* untuk efektifitas, kualitas dan transparansi distribusi pelayanan kesehatan.

Bagaimana Indonesia? Pemerintah membangun sistem pelayanan berbasis elektronik (*e-government*), untuk menggabungkan seluruh pelayanan pemerintahan yang berbasis *big data* secara nasional, sehingga lebih cepat, mudah, murah, efektif, efisien, terintegrasi. Kita bisa menghilangkan silo, memangkas birokrasi yang berbelit, memudahkan pelayanan, bahkan menghemat triliunan rupiah anggaran dengan sistem ini. Di dalam SPBE, ada SP4N LAPOR, sistem pengaduan nasional yang menjaga sirkulasi penyerapan aspirasi masyarakat untuk pemerintah.

Fakta studi dari Technical Assistance Research Programs menyebutkan hanya satu dari 26 *costumer* menyampaikan keluhannya secara formal. **White House Office Of Consumer Affairs (USA)** menyampaikan pengalaman buruk *costumer* diberitahukan kepada 9 - 15 orang. Maka, dalam konteks kepercayaan publik, sangat penting bagi pemerintah menyiapkan saluran untuk menyerap aspirasi masyarakat, meredam meluasnya citra buruk pelayanan sektor publik, serta koreksi untuk peningkatan kualitas kebijakan publik yang lebih baik (*Claus Moller & Janelle Barlow* --- "*Complaint Is A Gift*").

Banyaknya pengaduan jangan sebatas diartikulasikan bahwa "pelayanan publik buruk", tetapi dalam konteks *open government*, itu adalah wujud nyata partisipasi warga dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini adalah kontribusi bagi peningkatan tata kelola pemerintahan. Contoh: juara UNPSA tahun 2016, inovasi pengaduan NYC 311, menampung 36 juta aspirasi, pengaduan, dan permintaan informasi publik.

Inilah urgensi SP4N LAPOR, yang dirancang untuk memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan, saran, masukan dan harapannya kepada pemerintah. Pengaduan dijaring secara terpadu (dari pusat hingga daerah dan unit pelayanan terkecil), pengelolaan juga tidak teduplikasi (menghemat anggaran negara), tepat sasaran pada lembaga yang berwenang menangani (*no wrong door policy*), tidak ada penolakan terhadap aduan, mudah diakses dan dikelola, penanganannya tuntas (status laporan mudah ditelusuri). SP4N LAPOR memiliki kanal beragam: bisa melalui 1) Website ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)); 2) SMS 1708; 3) Twitter; 4) aplikasi android, serta 5) aplikasi pengaduan internal instansi yang telah terintegrasi. Pada Agustus 2019, SP4N-LAPOR! telah menghubungkan 642 instansi pemerintah (34 kementerian, 98 lembaga, 510 pemda).

Secara struktural, empat K/L yang mengelola sistem adalah: 1) Kementerian PANRB sebagai pembina pelayanan publik; 2) Kantor Staf Presiden sebagai pengendali program prioritas; 3) Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik; 4) Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintah daerah.

Tahun 2019 sebanyak 103.378 laporan masuk dan 40.649 laporan ditindaklanjuti instansi berwenang. Laporan tidak disposisi masih banyak karena terlalu umum/bukan wewenang





permerintah/tidak dapat dimengerti. Maka, sosialisasi SP4N LAPOR! Sangat penting untuk meluaskan tata cara pengaduan yang benar agar tepat sasaran dan setiap pengaduan tidak menjadi sia-sia.

**Bapak dan ibu sekalian,**

Bahwa disrupsi teknologi harus dibarengi dengan kedaulatan data (keamanan data). Kita harus waspada! Riset dunia mencatat bahwa kepercayaan terhadap sektor privat, publik, dan NGO terkikis pelan, karena kepercayaan pada teknologi menurun akibat otomatisasi; pelanggaran keamanan data; sistem global yang menjatuhkan masyarakat; ketidaksetaraan pada segmen populasi global (*Edelman Trust Index 2019*).

Maka, sebagai penjaga sistem politik dan sosial, dalam membangun kepercayaan dan transparansi publik, pemerintah harus pula mengantisipasi disrupsi digital.



Ruang pengaduan boleh bersifat maya, kegiatan pemerintahan juga diakselerasi pada ruang siber, digitalisasi sudah membuka dunia untuk Indonesia, tetapi kita juga harus menjaga ruang saluran komunikasi pemerintah dan masyarakat berjalan konstruktif untuk peningkatan tata kelola pemerintahan, pembangunan masyarakat dan pertumbuhan. Mari mengoptimalkan SP4N LAPOR! Untuk pemerintahan yang lebih baik, Indonesia Melayani.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Tjahjo Kumolo**



**Keynote Speech Minister**  
**Asean-Republic of Korea Commemorative Summit**  
Busan, November 26<sup>th</sup> 2019

**Assalamualaikum Wr. Wb.,**

**Honorable:**

- His Excellency, Minister of Interior and Safety of the Republic of Korea.
- His Excellency, Ministers Concerning of Public Administration from Asean Countries;
- All Distinguished Delegates.

Praise be to Allah SWT, we all gathered in this *Ministerial Roundtable Meeting* (held in the Asean-Republic of Korea Commemorative Summit), commemorating good relationship between the Republic of Korea and Asean Countries.

On behalf of Indonesian government, I would like to express gratitude to his excellency Minister of Interior and Safety of the Republic of Korea for consistently having this event. I believe this meeting is very beneficial to create ideas and produce a respectable relationship between the Republic of Korea and Republic of Indonesia in particular.

**Ladies and gentlemen,**

In this remarkable event, Indonesia sees that the government and citizen are two key elements of a nation, in terms of producing and implementing public policies. Therefore, the government and citizen's generation have to be ready to deal with "the storm" of uncertainty, global changes, and universal humanitarian challenges. For instance: 1) global economic recession along with consumer revolution (middle class and fluent consumer demography growth to 141 million people in 2020). Therefore, locals should optimize opportunities, not to be taken by outsiders; 2) large and global urbanization; 3) the depletion of natural resources; 4) climate change and extreme weather; also 5) disruption of technology, digitalization and knowledge.

Hence, I am emphasizing the importance of bureaucratic reform, which was built by the three pillars: government, citizen and stakeholder (*open government*) strengthened, executing the strategic role in overcoming problems, and balancing government programs that can fulfill citizens' expectation of a quality public services and creating a giant leap "through uncertainty and changes".

By means of open government framework, which are built by collaboration, synergy, solidity, and trust. If citizen trust the government, then the government will have more confidence in running the program. Citizen and the government (central and regional) are supporting the growth and development of a nation. This is the primary key to build the government's awareness in dealing with future dynamic changes.

**Ladies and gentlemen,**

One of the focal points in fostering public trust is to provide a communication channel between the government and its citizens. It is because the era have shifted in the direction of technology and digitalization. For that reason, an adaptive and flexible communication channel to technology is required to capture the citizen's expectation.

There are plenty of examples, for instance: research of Big Innovation System From United Kingdom point out the disclosure of access to data (public, business, services) that could have its government to become more effective. Singapore featuring Smart Nation, a transformation of government digital that still serves the public via personal touch where technology is considered only as a tool. Denmark



(overcoming the aging population) built trust with artificial intelligent and big data for effectivity, quality, and transparency of health service distribution.

What about Indonesia? Our government establishes government service system based on electronic as we called it Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) in order to combine all government services based on big data national thus become faster, easier, cheaper, more effective, more efficient, and integrated. We can eliminate silo, trim bureaucracy, ease the services, and save million of dollars of budget. Within SPBE, we have SP4N LAPOR!, this is the comprehensive complaint management system in Indonesia.

Study fact by Technical Assistance Research Programs revealed that merely one out of twenty-six customers that submit his complaint in formal. White House Office of Constumer Affairs (USA) revealed that a dissatisfied customer will tell between 9-15 people about their experience. Around 13% of dissatisfied customers tell more than 20 people. Therefore, in a context of public service, it is crucial for the government to provide channels for absorbing community aspiration, reducing extension of bad images of public sector services, and correction for improving the quality of community (Claus Moller & Janelle Barlow, "Complaint is a Gift").

Number of complaints must not be articulated as bad public service, however in a context of open government, it is infrastructures real citizens participation in improving the quality of public services. It contributes to improved governance, for example: Winner in UNPSA 2016, NYC 311 compliance innovation, accepting 36 million aspirations, complaints, and requests for public information.

For that reason, the urgency of SP4N LAPOR!, that was designed to facilitate the complaint, advice, feedback and expectations submitted by the community to the government. Integrated networking complaints (from local centers and smallest service units), management is also not duplicated (saving state budget), right on target, appropriate targets on handling agencies (no wrong door policy), no rejection to complaints, accessible and well-managed, completely handled (uncomplicated to search the report). With Multiple channels: 1) website ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)); 2) text message 1708; 3) twitter; 4) android application, and 5) internal institution complaints application that has been integrated. In August 2019, SP4N-LAPOR! has been connected to 642 government institutions (34 ministry, 98 agencies, 510 local governments).

Furthermore, there are four ministry managing the system: 1) Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform as coordinator of national public service; 2) Presidential Staff Office as priority program controller; 3) Ombudsman Republic of Indonesia as supervisor of public service; 4) Ministry of Home Affairs as local governments coordinator of public service.

In 2019 there are 103.378 entry reports, 40.649 reports were proceeded to authorized institutions. Nevertheless, there were several reports that has not been taken into action due to unspecified reports or non-governmental authority reports or non-comprehensible reports. Consequently, socializing SP4N LAPOR! is essential to broaden the citizen's knowledge on procedures in making complaints.

### **Ladies and gentlemen,**

Technological disruption is required to be paired with data sovereignty (data security). We need to be alert! World research published that trust on the private, public, and non-government organization has been eroded slowly. It is because of the decreasing trust in technology, automaticity, data breach violation, global system that plunge the community; and inequality in global population segments (Edelman Trust Index 2019).

"As a consequence, in maintaining public trust and transparency, the government as a political and social systems preserver, have a duty to anticipate the digital disruption".

The complaints in virtual are also accelerated in the cyber space. Digitalization has opened the gate for Indonesia, yet we also have to keep the government and communication channel rooms move along



constructively for improving governance, community development and growth. Let's optimize SP4N LAPOR! for a better government, Indonesia serves the citizen.

Thank You.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

**Minister of Administrative  
and Bureaucratic Reform,**

**Tjahjo Kumolo**



# **DESEMBER**

# **2019**





## SAMBUTAN PADA ACARA MALAM ANUGERAH ASN 2019

Jakarta, 2 Desember 2019

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.,*  
Salam Sejahtera untuk Kita Semua,

Saya memulai sambutan saya dengan sebuah pepatah Jawa *Sepi ing pamrih rame ing gawe* dan sebuah pepatah Sentani–Papua *Ani Foise Hokhogondere Ne, Khalya Na Hebhernyea Nenghinde Mokhowende*, yang bermakna bekerja tekun dan tulus tanpa pamrih akan memberi hasil yang terbaik. Dua pepatah yang sangat tepat menggambarkan para ASN yang berada di hadapan kita semua malam ini. Karena karya-karya mereka, keberkahan bagi bangsa ini akan dilimpahkan sebagaimana pepatah Sulawesi, *Resopa Temmangingi Namalomo Naletei Pammase Dewata*.

Bersama kita telah hadir para nomine yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang telah membuktikan bahwa bekerja tak harus dibatasi oleh kungkungan jam kerja dan manfaat yang hanya bisa dirasakan oleh diri dan instansinya semata. Mengabdikan diri sebagai ASN berarti menciptakan terobosan, membuka peluang perbaikan dan inovasi, kepemimpinan yang efektif dan kesiapan untuk menjadi pemimpin di masa depan.

Capaian mereka, makin menggerus citra kelambanan bahkan kemalasan ASN. Prestasi mereka menginspirasi dan mengajak ASN lain untuk berkarya seperti mereka dan pada akhirnya akan mendorong menjadi sebuah gerakan masif bagi perbaikan negeri ini. Perbaikan layanan kepada masyarakat yang secara nyata akan dinikmati, mendukung perwujudan Indonesia Emas di tahun 2045 nanti.

**Selamat untuk para pemenang, teruslah berkarya dan berkinerja demi kejayaan bangsa kita.**





Pada kesempatan ini, saya juga mengumumkan bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait penyederhanaan eselonisasi, Kementerian PANRB sudah memulai proses dengan mengalihkan 52 pejabat administrator ke jabatan fungsional ahli madya dan 89 pejabat pengawas ke jabatan fungsional ahli muda. Saya berharap proses yang sudah digulirkan ini dapat diikuti oleh semua instansi pemerintah. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.,*

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Tjahjo Kumolo**



**POINTERS PADA ACARA  
PELEPASAN ALUMNI PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK I. ANGKATAN XLIII (43)  
MEMBANGUN AGILE BUREACRACY UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA**

Jakarta, 5 Desember 2019

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.,*  
Salam Sejahtera untuk Kita Semua,

1. Persaingan antar negara dalam dunia global terus meningkat. Semakin tinggi daya saing sebuah negara, semakin kuat posisinya dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
2. Secara sederhana, daya saing sebuah negara merujuk kepada kemampuan negara tersebut membangkitkan/ menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya.
3. Setidaknya ada tiga alasan mengapa daya saing sangat penting bagi sebuah negara.  
**Pertama, produktivitas.** Semakin tinggi daya saing sebuah negara, menunjukkan semakin tinggi produktivitas warga negaranya.  
**Kedua, investasi.** Semakin tinggi daya saing sebuah negara akan menarik investasi asing masuk ke negara tersebut yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.  
**Ketiga, stabilitas dan ketahanan.** Negara yang memiliki daya saing tinggi juga menunjukkan kemampuan untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi dari kemungkinan resesi.
4. Kita masih harus berjuang keras untuk meningkatkan daya saing bangsa.  
Peringkat daya saing Indonesia pada tahun ini turun ke peringkat 50, dari posisi sebelumnya 45. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Singapura berada pada peringkat pertama, Malaysia peringkat 27, dan Thailand peringkat 40. Vietnam diperingkat 60, tetapi berhasil mencatat kemajuan yang luar biasa, naik 10 peringkat.  
Demikian juga dengan peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*). Indonesia pada tahun ini mengalami penurunan satu peringkat, dari peringkat ke 72 menjadi peringkat ke 73. Masih berada jauh di bawah Singapura yang berada di urutan 2, Malaysia diurutan 15, Thailand diurutan 27 dan Vietnam diurutan 69.  
Dari sisi Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*), pada tahun 2019 dari sisi skor kita sedikit mengalami kenaikan dari skor 37 pada tahun 2018 menjadi 38 tahun ini. Tetapi posisi kita masih berada di bawah skor negara ASEAN lainnya. Singapura memiliki skor 85, Malaysia: skor 47, dan Brunei Darussalam: skor 63.
5. Arahan Presiden terkait dengan reformasi birokrasi ada dua, yaitu mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif dan efisien kepada publik, dan yang kedua adalah mempercepat proses perizinan.
6. Dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, dan berintegritas sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai janji politik adalah masalah reformasi birokrasi, yaitu membangun tata kelola yang efektif dan efisien baik pusat dan daerah.





7. Saya mengamati, kita sudah melakukan reformasi birokrasi. Namun, mayoritas masih pelaksanaan ditingkat kulit, belum mencapai reformasi ke tingkat jantung atau intinya. Sebagai contoh: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah melakukan reformasi birokrasi hampir pada tingkat jantung, Pemerintah DIY memangkas lebih dari 3000 program/kegiatan menjadi hanya 800 program/kegiatan termasuk dalam menata kebijakan tata kelola pemerintahan.



8. Arahan Presiden adalah pelaksanaan reformasi birokrasi sampai ke-“jantungnya”. Kami menerjemahkan bahwa reformasi birokrasi adalah tidak memangkas birokrasi, tetapi merampingkan birokrasi. Hal ini harus dilaksanakan dengan hati-hati dan cermat. Sehingga, harus diidentifikasi jabatan-jabatan mana yang harus menjadi fungsional dan mana yang struktural. Misalnya, kepala kelurahan, kepala kecamatan, lembaga pemasyarakatan, kepala kantor, dan sebagainya.
9. Selanjutnya, terkait dengan kemampuan peningkatan daya saing bangsa, sangat tergantung dari kemampuan intelegensia daya saing (*competitive intelligence*) negara tersebut untuk mengidentifikasi dan menilai kecenderungan-kecenderungan global, mencegah dan mengendalikan risiko, membangun strategi untuk menghadapi persaingan, kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor kunci yang menjadi pendorong peningkatan daya saing, kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang mampu mendorong peningkatan daya saing.
10. Belajar dari negara Singapura, ada konsep *Managing For Excellence* (MFE), kerangka konsep ini digunakan sebagai panduan strategis pemerintah ditingkat kementerian dalam menyusun konsep penerapan *e-government* di instansi masing-masing.
11. Keberhasilan penerapan *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat bergantung pada perubahan paradigma manajemen pemerintahan, yaitu kemampuan SDM pemerintah untuk memahami, menghayati, dan menerapkan perubahan paradigma konvensional menjadi berbasis teknologi digital.
12. Perubahan paradigma *e-government* perlu didukung dengan infrastruktur dan suprastruktur (kebijakan) yang memperhatikan orientasi ke masa depan, proses bisnis organisasi, gaya



kepemimpinan, komunikasi internal dan eksternal, dan model layanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

13. Karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang *agile*, birokrasi pemerintahan harus terus melakukan pembelajaran berkelanjutan (*continuous learning*), pengambilan keputusan yang cepat dan efektif (*fast and effective execution*), dan perubahan yang tidak pernah berakhir (*unending change*). Birokrasi pemerintahan juga harus selalu muncul dengan ide-ide baru (*new ideas*), pandangan yang segar (*fresh perception*), melakukan peningkatan secara berkelanjutan (*continual upgrading*), bertindak cepat (*quick action*), beradaptasi dengan fleksibel (*flexible adaptations*), dan inovasi kreatif (*creative innovation*).
14. Dengan pembekalan yang diperoleh dari pelatihan kepemimpinan nasional ini, saya berharap sekembalinya saudara-saudara nanti ke instansinya masing-masing dapat menjadi orang-orang ikut mendorong percepatan perubahan pemerintahan kita menjadi pemerintahan yang lebih lincah.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Tjahjo Kumolo**



**SAMBUTAN PADA ACARA  
APRESIASI DAN PENGHARGAAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)**

Jakarta, 10 Desember 2019

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.,  
Salam Sejahtera untuk Kita Semua.*

**Yang saya hormati:**

- Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- Menteri Keuangan; Menteri Hukum dan HAM; Menteri Luar Negeri; Menteri Agama; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Perindustrian; Menteri Perhubungan; dan Menteri Pertanian;
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Pimpinan KPK;
- Para Kepala LPNK;
- Para Gubernur dan Para Bupati;
- Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Madya, dan Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

**Bapak Wakil Presiden serta hadirin yang berbahagia,**

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK atau WBBM ini merupakan salah satu arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas korupsi, terpercaya, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan industri 4.0.

Kami laporkan, pada tahun 2019 ini, Instansi Pemerintah yang telah mengusulkan unit kerja pelayanannya untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) sebanyak 90 Instansi Pemerintah. Dari 90 Instansi Pemerintah tersebut, sebagian besar unit kerja diusulkan oleh Aparat Penegak Hukum yang terdiri dari Kepolisian RI, BPN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, TNI, dan Kementerian Pertahanan.

Pada tahun 2019 ini pula, pembangunan Zona Integritas berfokus pada kawasan STRANAS-PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi). Adapun jika dilihat dari sisi jumlah unit kerja pelayanan yang diusulkan, pada tahun 2019 terdapat kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 247%. Dari 910-unit kerja pelayanan di tahun 2018, menjadi 2246-unit kerja di tahun 2019. Dari





2246-unit kerja tersebut, sebanyak 469-unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBK dan 34-unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBBM. Hal ini menunjukkan trend yang positif.

Kunci utama keberhasilan pembangunan Zona Integritas dilihat dari Nilai Persepsi Korupsi dan Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan. Penilaian dilaksanakan dengan metode survey kepada konsumen atau masyarakat yang menerima pelayanan langsung.

Instrumen survei hasil pembangunan Zona Integritas juga dikembangkan dari instrumen survey Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga dapat menggambarkan seberapa baik upaya pemberantasan korupsi diterapkan oleh instansi pemerintah.

Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Wakil Presiden, untuk memberikan arahan sekaligus memberikan penghargaan kepada 16 Pimpinan Kementerian/Lembaga yang berhasil membangun banyak unit kerja Zona Integritas di Instansinya, sehingga layak mendapatkan Predikat WBK atau WBBM.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepada kita dalam pengabdian kita kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Tjahjo Kumolo**